

Afkar, Vol. VI No. 1 /1999

## KONGLOMERASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH, HUKUM DAN KEBIJAKAN

MARIMAN DARTO

*Perkembangan konglomerasi di Tanah Air ternyata berurat sejak zaman penjajahan Belanda hingga diwariskan pada zaman Orde Lama. Perilaku konglomerasi ini semakin mengeras ketika zaman Orde Baru naik ke tampuk kekuasaan. Akibat kondisi ekonomi yang porak-poranda membuat perilaku konglomerasi mendapat justifikasi non-formal. Banyak kaum usahawan mulai meniti karier usahanya dengan praktik-praktik patron-klien, nepotisme, dan kolusif. Akhirnya muncullah pengusaha Ali-Baba. Tulisan di bawah ini mengelaborasinya dalam perspektif sejarah, hukum, dan kebijakan.*

**M**endiskusikan masalah konglomerat pada masa krisis ekonomi-moneter dan politik yang melanda Indonesia adalah sangat menarik. *Pertama*, konglomerat yang semula merupakan simbol keberhasilan pembangunan nasional rezim Orde Baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, namun kini tidak lagi. Ini pertanda ketergantungan konglomerat yang sangat besar terhadap kekuasaan ternyata menyebabkan mereka tidak *imun* terhadap serangan ganas krisis ekonomi-moneter. Sekaligus

menunjukkan tidak efisiennya mekanisme atau struktur perusahaan-perusahaan konglomerat.

*Kedua*, terpuruknya era konglomerasi Orde Baru tersebut ternyata tidak diikuti oleh kelompok usaha kecil-menengah yang kini mencapai angka 35 juta unit usaha. Ini menunjukkan bahwa betapapun berbagai tekanan yang menghambat perkembangannya, tidak menyebabkan usaha kecil mundur tetapi justru memberikan peluang yang sangat besar bagi tenaga kerja di Indonesia. Hal ini juga dapat diinterpretasikan bahwa karakteristik struktur perekonomian kita bukan konglomerasi, namun ekonomi rakyat, yang di dalamnya adalah usaha kecil dan menengah.

Sayangnya, ketika kelompok usaha kecil dan menengah mendapatkan angin segar untuk dikembangkan, bersamaan dengan itu ada kelompok-kelompok yang tidak sepekat. Ini berarti bahwa sekalipun kontribusi usaha kecil terhadap penyerapan tenaga kerja sangat besar yakni mencapai 70 persen dari total tenaga kerja yang diserap oleh unit usaha nasional, tidak membuat kelompok terbesar usaha dalam struktur perekonomian bisa menghirup udara segar tadi.

Perdefinisi konglomerat adalah kumpulan *profit centers* yang dimiliki oleh satu orang atau perkongsian dari sekelompok kecil orang (Gie, 1994;1998). Menurut Kwik Kian Gie, konglomerat adalah pengertian yang netral, di mana kita tidak bisa begitu saja menilai baik atau buruk. Karena menurutnya, untuk menilai baik buruknya harus dinilai dari perilakunya. Bahwa ada yang menilai konglomerat itu buruk harus dilihat dari perilaku *dirty and tricky mind*, yakni pikiran kotoranya orang gadungan, cara-cara cerdik-lilik yang tidak mengenal hati nurani dan etika, menyalahgunakan segala celah yang tersedia untuk memiliki konglomerat dalam waktu relatif singkat, dan lalu menggunakan konglomeratnya untuk bermanipulasi dan berkelit dengan cara *pat-pat gulipat* dan *sim-sim salabim*, supaya orang luar bingung dan tidak ada yang bisa mengontrolnya.

Untuk itulah tulisan ini mengajak pembaca untuk sampai pada penilaian apakah konglomerat itu baik atau buruk? Untuk itu tulisan ini mencoba menelusuri berbagai jawaban atas pertanyaan itu dalam perspektif sejarah, hukum dan kebijakan. Terkait dengan perspektif sejarah, secara singkat dijelaskan perkembangan konglomerasi pada masa Orde Lama dan pada masa Orde Baru. Sedangkan yang menyangkut masalah hukum akan dibahas mengenai masalah peraturan perundang-undangan dan berbagai keputusan presiden (Keppres). Sementara itu yang terkait dengan kebijaksananya mendapatkan tempat pembahasan yang cukup panjang, dengan menganalisis berbagai kebijakan yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya konglomerasi di Indonesia, antara lain kebijakan di bidang perdagangan, investasi, pajak, penetapan harga dan perlakuan khusus.

### **Sejarah Singkat Konglomerasi di Indonesia**

#### ***1. Konglomerasi Masa Orde Lama***

Di Indonesia, munculnya konglomerasi tidak lepas kaitan dengan kekhasan politik pemerintah Hindia Belanda (Onghokham, 1998). Kekhasan politiknya ditandai oleh upaya pemerintah dalam pengelompokan struktur masyarakat berdasarkan kasta-kasta, yakni atas dasar kulit berwarna dalam kehidupan ekonominya. Pengelompokan melalui strata sosial inilah yang kemudian melahirkan berbagai kelompok dominan dan kelompok yang tidak dominan. Atau oleh banyak kalangan dijadikan alasan bagi munculnya embrio dualisme kekuasaan yang kemudian juga melahirkan dualisme ekonomi. Di mana secara sengaja pemerintah Hindia Belanda menempatkan konglomerat, golongan Eropa (kulit putih) yang kapitalis-dinamis berada di atas sebagai kaum terhormat atau kelompok dominan. Sedangkan penduduk "Timur" (pribumi), dengan ciri khasnya gotong royong dan saling berbagi ditempatkan

sebagai masyarakat bawah sebagai kelompok marginal atau tidak dominan. Dalam perkembangannya, kelompok dominan adalah merupakan kelompok yang paling diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan bidang ekonomi pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu.

Model dualisme ekonomi ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Di hampir seluruh negara bekas jajahan, perlakuan penguasa kolonial hampir sama motifnya. Penguasaan tanah-tanah adat dan tanah-tanah petani kecil merajalela di mana-mana. Motif demikian didorong oleh kondisi rakyat petani, yang pada waktu itu, kebanyakan buta huruf dan tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan tanahnya. Upaya mendapatkan tanah ini dilakukan melalui berbagai intimidasi bahkan seringkali dengan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan tanah-tanah tadi.

Hal inilah yang dimaksud dengan kekhasan politik pemerintah pada waktu itu bahwa sejarah ekonomi kolonial adalah sejarah kapitalisme baik dari, oleh dan demi negara (kolonial) dan swasta, di mana rakyat hanya dijajah, karena hak-hak dasarnya tidak diakui, baik dari hak milik, hak akan tenaga sendiri, hak berpendapat dan seterusnya. Perilaku ketidakadilan terhadap rakyat, yang telah dilakukan sejak bercokolnya pemerintah kolonial Hindia Belanda, itulah yang pada akir-akhir ini mendasari *mob-violence*, kekerasan massa.

Pola pemerintah itu tampaknya terus diwarisi oleh para pemimpin dan penguasa di negeri ini. Warisan pemerintah kolonial inilah yang sekarang ini memperkuat kedudukan konglomerat – yang hampir semuanya adalah konglomerat Cina.

Ruth Mc Vey (1998a), mengkarakteristikkan warisan dari masa kolonial sebagai berikut:

a. Meskipun peran konglomerat Cina biasanya berkembang karena dorongan dari para penguasa, namun mereka adalah “paria” sangat bergantung dari segi politik dan tidak dapat mengandalkan

negara untuk melindungi kepentingan mereka. Akibatnya jaringan keuangan dan hubungan usaha mereka tidak banyak bergantung pada negara. Keadaan yang demikian ini, justru akan mempermudah mereka untuk menghindarkan diri dari pungutan-pungutan pemerintah, dan juga akan sangat membantu mengubah sektor-sektor perekonomian yang didominasi oleh konglomerat Cina menjadi sektor-sektor yang tertutup yang tidak dapat ditembus oleh pengusaha pribumi (dan oleh orang Cina anggota kelompok dialek yang berbeda).

b. Kegiatan orang Cina hingga memasuki pasar dunia disebabkan oleh dua cara. *Pertama*, memanfaatkan peran mereka sebagai perantara antara perusahaan besar Barat dan perekonomian lokal. Mereka sebagian besar memperoleh keterampilan mengenai perdagangan modern dan teknik-teknik industri pengolahan serta (yang jarang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Barat) mengenai pasar lokal. Inilah yang menjadi faktor utama mengapa perusahaan-perusahaan Jepang mencari orang Cina untuk menjadi mitra dialog ketika membangun kembali kehadiran mereka di Asia Tenggara setelah Perang Dunia II (PD II). *Kedua*, memanfaatkan mata rantai hubungan dan kepercayaan yang diciptakan oleh orang-orang Cina yang tinggal di perantauan guna mendirikan jaringan perdagangan dan keuangan yang mencakup Asia Tenggara, Taiwan, Hong Kong, dan akhirnya di daerah seputar Pasifik (*Pacific Rim*) pada umumnya. Ini menjadi sumberdaya yang kuat untuk proteksi dan mengerahkan modal. Rezim-rezim yang mempertimbangkan untuk mengurangi kedudukan Cina lokal harus memperhitungkan mudahnya modal Cina angkat kaki dan segala konsekuensi yang melumpuhkan.

Tampaknya bukan hanya faktor warisan kolonial saja yang menyebabkan konglomerat Cina sukses. Budaya Konfusius (*Confucian Culture*) diyakini oleh sebagian pengamat sebagai faktor yang menentukan suksesnya kaum konglomerat Cina. Sebagaimana

Jepang, beberapa pengamat melihat bahwa di negara-negara industri baru (*newly industrialising countries* - NIB) seperti Korea Selatan, Cina, Taiwan, Hong Kong dan Singapura memiliki persamaan budaya Cina, *Confucian Culture*, di mana nilai-nilai kerajinan, ketertiban, tanggung jawab pribadi dan lain sebagainya telah mendorong perilaku kapitalis (Mc Vey, 1998b).

Bagi Indonesia khususnya dan negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya, argumen di atas memiliki dampak politik yang kental, karena minoritas Cina yang kuat dari sudut ekonomi itu memiliki keunggulan budaya dibandingkan dengan penduduk pribumi (Mc Vey, 1998c). Karena itu berbagai kebijakan apapun tentu akan sangat menguntungkan konglomerat Cina. Bukan saja karena faktor alamiah budaya yang mereka miliki yang akan menyebabkan mereka berhasil, namun juga karena kelihaihan konglomerat Cina yang sejak awal telah dekat dengan penguasa sebagaimana yang telah diwarisinya dari pemerintah kolonial.

Hubungan antara konglomerat Cina dengan penguasa, baik kolonial maupun pribumi, lebih merupakan hubungan pribadi ketimbang sebagai sebuah kelompok bersatu yang memiliki kekuatan. Hubungan ini terjadi antara lain karena kesamaan kepentingan: para pengusaha memerlukan perlindungan dari hukum dan pesaing mereka, sementara penguasa membutuhkan uang untuk membiayai kehidupan pribadi dan menjaga prestise sosial mereka yang amat mewah (Supriatma, 1996b).

Menurut Supriatma, ada tiga alasan mengapa penguasa memberikan konsesi perdagangan tertentu kepada minoritas Tionghoa. *Pertama*, lebih aman memberikan kuasa ekonomi kepada golongan Tionghoa ketimbang kepada orang pribumi. *Kedua*, untuk menjaga rivalitas etnik antara pribumi dan Tionghoa. *Ketiga*, memotong kekuasaan ekonomi para penguasa politik tradisional berarti memotong pula materi politik yang biasa dipakai sebagai perlawanan.

## TINJAUAN

Pada awalnya istilah "wirausahawan pariah" masih sangat melekat. Pengusaha Cina harus banyak memberikan perhatian kepada pejabat sipil dan militer Indonesia. Karena mereka menjalankan usaha dalam suatu sistem politik yang sangat terpusat, otoriter dan sangat berdasarkan hubungan keluarga. Dan pada saat itu, kedudukan pengusaha Cina baik yang kaya raya, kelas menengah maupun yang miskin, jauh berada di pinggiran. Hal ini berbeda dengan pengusaha Cina Thailand yang sangat kuat berakar di dekat jantung perekonomian dan struktur kelas Thailand.

Sebagai akibat dari kedudukan yang sangat rapuh itu, pengusaha Cina sangat berkepentingan dengan *status quo*, dengan demikian memiliki hubungan simbiosis dengan para pemimpin pemerintahan saat itu. Karena itu, menurut Mc Vey (1998d) tidak mengherankan jika pengusaha terkemuka Cina memiliki waktu investasi yang pendek, mengutamakan keamanan, menerima kenyataan harus memberikan imbalan guna memperoleh perlindungan politik berdasarkan hubungan patro-klien, pelindung yang dilindungi, dan tidak memainkan peran dalam upaya memperluas hak-hak sipil.

Peran ekonomi konglomerat Cina di Indonesia dalam 20 tahun terakhir sebelum PD II telah mengalami perubahan besar. Terutama karena telah banyak pengusaha Cina yang masuk dalam kegiatan perdagangan dan industri-industri dasar di seluruh Nusantara. Sayangnya, mereka masih terhalang oleh dominasi modal Belanda di semua sektor perekonomian modern. Depresi ekonomi tahun 1930-an, Perang Dunia II, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia membuka peluang baru yang lebih luas. Periode awal pasca revolusi merupakan periode di mana Indonesia mulai membuka perluasan ekonomi. Namun bagi pengusaha Cina masih mempertahankan kedudukan mereka dalam bidang-bidang terpenting sampai kekayaan mereka diambil alih oleh pemerintah Indonesia tahun 1957-1968.

Setelah investasi Belanda diambil alih oleh pemerintah dan dimasukkan ke dalam sektor pemerintahan pada masa Ekonomi Terpimpin di bawah presiden Soekarno, suatu tahap kegiatan perekonomian yang baru mulai terbuka untuk pengusaha Cina. Diakui oleh mereka, masa ini merupakan masa yang sangat sulit karena ideologi resmi amat menentang perusahaan swasta pada umumnya, dan rasa anti-Cina yang kuat dibangkitkan oleh unsur-unsur sayap kanan sebagai cara untuk menyerang Soekarno dan sayap kiri. Namun dalam kondisi yang kacau dan inflasi tinggi pada masa Demokrasi Terpimpin inilah para pengusaha Cina membuktikan mereka tidak dapat diabaikan, karena perusahaan-perusahaan negara dan jaringan distribusinya yang kacau, tak mampu menjalankan usaha secara efektif dalam keadaan itu kecuali melalui bantuan pengusaha Cina (Mc Vey, 1998e). Dan, diakui pengusaha Cina mampu eksis dan bertahan lebih baik dibandingkan pengusaha pribumi, di mana pada tahun-tahun itu tidak banyak uang yang bisa diperoleh. Karena kemampuannya itu, ketika iklim ekonomi mulai membaik dan terbuka untuk swasta pada masa Orde Baru, pengusaha Cina sungguh sangat maju usahanya.

## *2. Konglomerasi Masa Orde Baru*

Kemakmuran konglomerat-konglomerat Cina di bawah rezim Orde Baru seringkali dikaitkan dengan koneksi politik mereka sebagai cukong bagi pemegang kekuasaan Orde Baru. Istilah cukong ini populer sekitar tahun 70-an untuk menggambarkan tingkat hubungan yang sangat erat antara seorang Cina yang mengetahui bagaimana cara mencari uang dengan pejabat pemerintah Orde Baru (seringkali seorang perwira tentara) yang dapat memberikan perlindungan dan menggunakan pengaruhnya.

Pada awal pemerintahan Soeharto, anggaran pemerintah sangat kecil, sehingga hanya cukup untuk membiayai sebagian kecil anggaran rutin antara lain untuk angkatan bersenjata dan

## TINJAUAN

pemerintahan daerah. Menurut Mc Vey (1998f), kecilnya anggaran negara yang sangat kecil ini, menyebabkan rezim Orde Baru menggali "dana inkonvensional" dengan cara apapun. Untuk tujuan inilah pejabat (penguasa) mengajak pemilik dana dan penasehat usaha Cina untuk mendapatkan dana-dana kompensasi tersebut. Tentu saja, dengan syarat bahwa kepentingan pemilik dana dan penasehat usaha tersebut harus terlindungi dari upaya-upaya jahat masyarakat, gangguan penjarah-penjarah lain dari kalangan militer dan sipil tentunya. Selain itu imbalan buat mereka juga termasuk kemudahan untuk memperoleh barang-barang yang tidak banyak tersedia di pasar, kredit bank, lisensi, dan kontrak-kontrak pemerintah. Akibatnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama hubungan antara perwira-perwira tentara tertentu dan pengusaha Cina berkembang luas.

Pada tahun 1970/1971 misalnya, eratnya hubungan cukong dengan penguasa telah sampai kepada presiden Soeharto dan keluarganya. Dan keadaan seperti ini telah mengundang kritik keras dari masyarakat. Di antara nama-nama cukong yang terkenal adalah Liem Sioe Liong. Konon, pola hubungan ini telah merambah kepada pejabat-pejabat di tingkat pemerintahan yang lebih rendah seperti gubernur dan panglima militer propinsi. Namun, pengusaha yang diajak kerjasama adalah pengusaha Cina setempat.

Pada menjelang tahun 1980-an dapat dikatakan sebagai puncak hubungan antara penguasa Indonesia dengan konglomerat Cina. Namun hubungan yang sangat erat itu pun menimbulkan antipati masyarakat yang diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan anti-Komunis Orde Baru pada tahun 1965-1967, kerusuhan anti-Cina pada tahun 1959 dan tahun 1963, serta beberapa kerusuhan anti-Cina lainnya pada masa Orde Baru. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa rapuhnya eksistensi konglomerat Cina yang sangat bergantung pada kedudukan politik pemerintahan Orde Baru.

Pada masa inilah, keseimbangan hubungan antara penguasa Indonesia dengan konglomerat Cina mengalami perubahan. Istilah "cukong" jarang lagi terdengar. Rejeki minyak (*oil-boom*) yang terjadi pada tahun 1973/1974 semakin memperteguh kekuasaan dan wewenang pemerintah dalam memperbesar sumber daya keuangannya. Hal inilah yang membedakannya dengan kondisi awal pemerintahan Orde Baru di mana kita hanya memiliki anggaran yang hanya cukup untuk membiayai sebagian kecil anggaran rutin seperti angkatan bersenjata dan pembangunan daerah.

Pergeseran hubungan antara penguasa dan konglomerat Cina tersebut menyebabkan para konglomerat Cina tidak lagi menggunakan jalur koneksi politik. Hal ini tidak berarti, para konglomerat Cina menjadi antipati terhadap koneksi politik, namun para konglomerat Cina tetap memelihara hubungan baik dengan para penguasa Orde Baru.

Hal yang patut dicatat dalam periode 1980-an adalah bahwa pengusaha-pengusaha terkaya tersebut lebih banyak bergerak di bidang keuangan dan perdagangan daripada di bidang industri pengolahan. Alasannya adalah sektor keuangan dan perdagangan banyak mendatangkan keuntungan sangat besar dalam jangka panjang, termasuk di dalamnya usaha tanah dan bangunan, jasa keuangan, perbankan, asuransi, dan konstruksi bangunan. Namun dalam jangka panjang, sektor industri pengolahan justru sangat menguntungkan.

### *Kerangka Hukum*

#### 1. Peraturan Perundang-undangan

Bermula dari munculnya UU PMA No. 1 tahun 1967 dan UU PMDN tahun 1968 yang memberikan fasilitas kemudahan mulai dari fasilitas perpajakan (*tax holiday*), perkreditas (kredit

dengan bunga rendah) dan sebagainya hingga jaminan devisa bebas, telah mengantar kelompok konglomerat memasuki seluruh bidang produksi (Haz, 1997). Kesempatan untuk mendirikan industri substitusi impor pertama-tama ditangkap oleh pedagang yang selama ini mengimpor jenis barang yang bersangkutan. Ini sangat logis karena sebagai importir mereka tentu telah mengenal, dan menguasai jalur distribusi komoditas itu. Kenyataan ini sebenarnya juga diperhitungkan oleh investor asing di mana jika mereka ingin masuk ke dalam bisnis di Indonesia untuk berpatungan dengan usaha lokal maka mereka memilih bekerjasama dengan mereka yang telah menguasai lika-liku bisnis itu.

## 2. Keputusan Presiden

Politik deregulasi dan debirokratisasi yang merupakan keputusan pemerintah (presiden) juga menjadi stimulan bangkitnya bisnis konglomerat. Ada beberapa hal penting untuk dicatat tentang bangkitnya konglomerat melalui keputusan intervensi pemerintah. *Pertama*, pemberlakuan sistem deregulasi di bidang intervensi perdagangan internasional dan sistem devisa, dan dilakukan pendekatan positif dengan berbagai insentif terhadap PMA maupun PMDN (1966-1969). Pemerintah pada saat itu melakukan kebijakan "pintu terbuka" di mana investor tidak perlu mengalami hambatan masuk. Bahkan kepemilikan asing bisa sampai 100%. Atas iklim usaha yang seperti itu, pertumbuhan sektor industri mencapai rata-rata 9,6% pertahun selama 1967 sampai 1973 (Pangestu, 1994).

*Kedua*, pada saat *boom* minyak (1973-1981), di mana proses industrialisasi terus dipacu melalui kombinasi dari kebijakan substitusi impor, peraturan investasi dan peningkatan kepemilikan pemerintah. Secara bertahap pemerintah menggunakan instrumen intervensi seperti lisensi usaha dan investasi untuk mengatur inves-

tasi domestik dan asing, penggunaan komponen domestik, dan perlindungan impor dari bentuk sistim tarif dan non-tarif.

Intervensi pemerintah ini diperlukan untuk melindungi pasar dalam negeri, untuk perkembangan produk dalam negeri, dan perkembangan industri-industri yang baru mulai (*infant industry*).

Apa yang dilakukan pemerintah dengan strategi substitusi impor, pada awalnya adalah baik karena memberikan proteksi yang sangat ketat terhadap industri dalam negeri dari produk-produk impor. Sayangnya, dalam perkembangannya kebijakan ini justru sangat tidak efisien karena mengakibatkan industri domestik menjadi "cengeng" kurang bisa berkembang dan sangat mandul jika dihadapkan dengan persaingan internasional.

Setidaknya menurut Didik J. Rachbini (1986), mengutip pendapat John Power, ada tiga alasan yang kurang mendukung penerapan strategi substitusi impor ini yakni : (a) inefisiensi ekonomi. Dalam strategi ISI alokasi sumberdaya dinilai kurang tepat. Jika harga pasar yang terwakili oleh variabel biaya setiap unit barang dan kegunaan (*utility*) pada tingkat margin adalah *given*, maka cenderung ada kebutuhan yang lebih besar dalam alokasi sumberdaya untuk menyimpan tambahan satu unit dari pertukaran melalui substitusi impor dibandingkan dengan mendapatkan satu unit tambahan dari pertukaran melalui perluasan ekspor. Bias lain adalah kebijakan neraca pembayaran cenderung mengontrol impor, sehingga akan menekan peluang perdagangan luar negeri suatu negara.

(b) Inefisiensi teknis. Yang paling jelas dari inefisiensi teknis adalah kealpaan negara untuk melihat keuntungan komparatifnya sebagai prinsip yang sangat membantu pengembangan teknologi produksi. Industri-industri yang diproteksi akan dengan mudah lahir sebagai industri yang tidak efisien dalam pilihan teknologinya.

(c) Kesenjangan tabungan. Ilustrasi untuk menerangkan dampak ini adalah dengan melihat model perdagangan internasional. Setiap peningkatan ekspor atau substitusi impor dengan memproduksi barang-barang akan menyebabkan peningkatan konsumsi domestik, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan investasi. Dalam strategi ISI ini investasi tersebut dipenuhi dengan mengimpor barang-barang modal sehingga cenderung mempertinggi tingkat akumulasi modal (*rate of capital accumulation*). Tabungan marginal (*marginal saving*) sangat tergantung pada alokasi investasi barang-barang modal, produksi untuk ekspor dan substitusi impor. Tetapi strategi substitusi impor, dengan penerapan sistem proteksi jelas tidak konsisten dengan prinsip rasional model perdagangan internasional.

Meskipun tingkat pertumbuhan investasi domestik dapat dipacu dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang masih bayi cukup tinggi, namun karena sangat tergantung dari kebijakan intervensi pemerintah maka industri-industri ini tentu sangat rapuh. Apa yang terjadi pada konglomerat-konglomerat yang merupakan produk Orde Baru sekarang ini yang tidak tahan terhadap serangan krisis ekonomi moneter bisa digunakan sebagai indikator kerapuhan industri kita yang banyak memanfaatkan fasilitas proteksi.

Setelah strategi ISI dinilai tidak cukup sukses, maka pemerintah memberlakukan strategi industrialisasi yang menempatkan peningkatan efisiensi, persaingan dan beorientasi ekspor (1986-1991). Strategi ini justru mampu mengangkat tumbuhnya industri manufaktur menjadi 11% pertahun selama periode itu. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan investasi swasta, domestik dan asing secara pesat dan berkembangnya ekspor produk manufaktur.

Pilihan terhadap kebijakan berorientasi ekspor ini menurut Didik (1996b), adalah untuk :

1. Memperkuat posisi eksternal, baik untuk memperkuat penerimaan devisa maupun untuk meredam gejolak perekonomian internasional.
  2. Memacu akselerasi pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri untuk tujuan ekspor dengan pencarian peluang pasar yang luas diberbagai negara.
  3. Mempekuat dan memperluas kedudukan ekspor komoditas tradisional yang telah dikembangkan sejak lama dalam bentuk yang telah terproses sebagai barang jadi.
  4. Meningkatkan penerimaan produsen (petani, pedagang, industriawan) maupun eksportir dalam kegiatan ekspor.
  5. Mempertinggi tingkat kepastian usaha bagi produsen dan eksportir melalui pencarian pasar yang tidak terbatas di luar negeri.
  6. Mempertinggi tingkat penyerapan tenaga kerja lewat berbagai kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk ekspor, baik untuk ekspor komoditas tradisional maupun komoditi industri manufaktur.
  7. Pengembangan industri untuk tujuan ekspor secara tidak langsung merupakan proses untuk mensubstitusi barang-barang manufaktur.
- Konglomerat Cina yang sejak awal memiliki peluang untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah yang paling besar mendapatkan kesempatan meraih kue pembangunan.
- Berbagai paket deregulasi yang dikeluarkan pemerintah dijadikan legitimasi politik ekonomi untuk berkembang secara menakjubkan. Meskipun penerbitan paket deregulasi ini adalah bentuk penyesuaian-penyesuaian akibat perubahan strategi industrialisasi dari yang berorientasi impor ke orientasi ekspor. Berbagai Paket Deregulasi yang dimaksud dapat dilihat dari uraian dalam sub bab berikut ini.

### *Kebijakan yang Mendukung Pertumbuhan Konglomerasi*

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal ini melalui kebijakan perdagangan, investasi pajak, penetapan harga dan perlakuan khusus. Secara lebih jelas mengenai kebijakan-kebijakan itu adalah sebagai berikut :

#### 1. Perdagangan (*Trade*)

Paket Juni 1983 tentang deregulasi perbankan yang kemudian disusul oleh deregulasi lanjutan pada bulan Juni 1988 (Paket Juni) yang ditandai oleh tingkat persaingan penerapan bunga tinggi berdasarkan mekanisme pasar, justru sangat menguntungkan sektor perdagangan luar negeri (ekspor). Apalagi, pada bulan Maret 1986, pemerintah melakukan devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 50 persen dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerintah dan mendorong ekspor non-migas (Hasibuan, 1997a).

Terobosan besar dilakukan pemerintah lagi. Pemerintah mengeluarkan paket untuk memperlancar arus barang, yang terkenal dengan kebijaksanaan Inpres No. 4 1986 (Hasibuan, 1997b). Kebijakan ini memaksa sebagian karyawan bea cukai dibebastugaskan. Sedangkan tugas bea dan cukai diserahkan pada SGS. Pada tahun itu juga terjadi penurunan tarif. Kebijakan ini benar-benar untuk menekan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena, tarif bea masuk yang tinggi dan dilakukannya proteksi non-tarif menimbulkan perburuan rente, dan merupakan sebagian sumber ekonomi biaya tinggi.

Kebijakan perdagangan yang lainnya adalah paket Mei 1986, yang memberikan kesempatan luas kepada produsen (eksportir) untuk membeli input industri di pasaran dunia, jika di dalam negeri terlalu tinggi, dan dapat meminjam modal kerja dengan tingkat bunga yang berlaku di pasaran internasional. Kebijakan ini

## TINJAUAN

selain untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi juga untuk mendorong masuknya investor asing untuk masuk ke dalam negeri.

Pada bulan September 1986, dengan mendadak pemerintah melakukan devaluasi rupiah, akibat menurunnya harga minyak dunia. Tujuan devaluasi ini adalah untuk mengamankan neraca pembayaran, walaupun jumlah utang luar negeri semakin meningkat. Selanjutnya satu bulan setelah itu pemerintah pada bulan Oktober 1986, terjadi penurunan tarif, sedangkan pada bulan November 1988 monopoli impor beberapa komoditi ditiadakan.

Tampak dengan jelas bahwa arah kebijakan yang dituangkan dalam berbagai paket deregulasi adalah untuk menghapus ekonomi biaya tinggi.

Secara ringkas, berbagai peraturan deregulasi perdagangan yang banyak memberikan peluang usaha konglomerat dapat dilihat dari *tabel 1* berikut ini:

**Tabel 1: Reformasi Perdagangan Indonesia, 1985-1995**

Reformasi	Isi	Tujuan/Dampak Tak Langsung
Maret 1985	Perusahaan Survey Swis ditugaskan untuk mengelola bea	Efek psikologis positif dini
April 1985	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Bea pelabuhan dikurangi</li> <li>◆ Industri pengapalan dibuka bagi kompetisi internasional</li> <li>◆ Penanganan pelabuhan disederhanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Mengurangi inefisiensi dalam pengiriman, penanganan pelabuhan</li> <li>◆ Peningkatan kompetisi ekspor</li> </ul>
Mei 1986	Pemberlakukan sistem bea terhadap produsen eksportir	Tanda yang jelas pada peningkatan ekspor sejalan dengan peningkatan investasi
Oktober 1986	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pengurangan ijin impor</li> <li>◆ Pentarifan</li> <li>◆ Pengurangan tarif lebih lanjut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Peningkatan lebih lanjut dalam orientasi investasi ekspor</li> <li>◆ Peningkatan dalam impor-impor penting (non-konsumsi)</li> </ul>
Januari 1987	Pengurangan lebih lanjut dalam ijin impor	Peningkatan lebih lanjut dalam orientasi investasi ekspor

## TINJAUAN

Juli 1987	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Masih ada kelanjutan pengurangan dalam ijin impor dengan tidak ada peningkatan tarif</li> <li>♦ Sistem alokasi kuota diperbaharui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Peningkatan lebih lanjut dalam orientasi investasi ekspor</li> </ul>
November 1988	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Deregulasi pengapalan antar pulau</li> <li>♦ Penghilangan monopoli dalam impor baja dan plastik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Peningkatan kompetisi</li> <li>♦ Peningkatan kepercayaan pada usaha pemerintah untuk menderegulasi kompetisi</li> </ul>
Mei 1990	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Deregulasi dalam obat-obatan dan peternakan</li> <li>♦ Penyesuaian pada tarif</li> <li>♦ Pengurangan dalam beberapa biaya rambahan</li> <li>♦ Penghilangan lebih lanjut pada rintangan non-tarif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Meningkatkan kompetisi</li> <li>♦ Perbaiki iklim investasi</li> </ul>
Juni 1990	Peningkatan komoditas untuk dapat diimpor	Memperbaiki sistem perdagangan untuk impor
Juli 1992	Penurunan lebih jauh tingkat tarif	Untuk meningkatkan persaingan
Oktober 1992	Deregulasi dua aspek ekspor-impor dan tarif	Untuk meningkatkan efisiensi dan persaingan
Mei 1995	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Perubahan taraniga impor dari IP, IT (impor terbatas) dan Bulog menjadi IU (impor umum) seperti: pelat baja, korek api, karung goni, dan lain-lain</li> <li>♦ Catatan: beberapa komoditi penting masih dikenakan tarif: garam, bungkil, kedelai, minuman alkohol, kendaraan bermotor, tas, terigu, gula, cengkih, bahan peledak</li> <li>♦ Peningkatan jumlah barang produksi perusahaan pengolahan di kawasan berikat (KB) dan EPTE (Enterport Produksi untuk Tujuan Ekspor)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Meningkatkan kesempatan investasi</li> <li>♦ Alasan khusus</li> </ul>

Sumber: (1) Tahun 1983-1989 oleh Iwan Jaya Aziz. Indonesia. Dalam Williamson. 1994. *The Political Economy of Policy*. WDC, Institute for International Economics, 1994, h.364;2)  
 (2). Tahun 1990-1995 oleh Didik J. Rachbini. 1996. *Ekonomi Politik: Paradigma, Teori, dan Perspektif Baru*. CIDES. Jakarta. H.142

## 2. Investasi

Kebijakan deregulasi dalam sektor investasi juga ditujukan untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi di bidang perijinan dan lain sebagainya. Pakmei 1986 adalah upaya serius pemerintah

## TINJAUAN

untuk mendorong investasi domestik melalui penarikan investor asing ke dalam negeri.

Sebagai kelanjutan paket ini, pada bulan Juli 1987 pemerintah melakukan deregulasi investasi dan perijinan kapasitas. Penanaman modal asing juga mendapatkan simpati dari pemerintah untuk masuk ke Indonesia, yang sebelumnya dilarang untuk mengambil bagian dalam kegiatan distributor di Indonesia. Dalam deregulasi ini, pemerintah juga membuka bursa efek bagi investor asing.

Untuk menegaskan komitmennya mengundang investor asing sebesar-besarnya, pemerintah mengeluarkan PP 20/94 tentang penanaman modal asing di Indonesia. Dalam PP 20/94 ini sektor publik dibuka 100 persen untuk investasi asing. Beberapa sektor publik itu antara lain : pelabuhan, listrik, telekomunikasi, pelayaran, air minum, kereta api, tenaga atom dan media massa.

Namun keberadaannya mengundang kritik keras dari banyak kalangan. Karena sebelumnya telah ada UU No.5 tahun 1994 tentang Undang-undang Pokok Perindustrian, di mana pada pasal 4 sampai dengan pasal 6 menyatakan bahwa industri strategis dan industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah, industri lainnya oleh swasta dan koperasi.

Liberalisasi investasi benar-benar dilakukan pemerintah. Setahun setelah mengumumkan peraturan pemerintah no 20 tahun 1994 tersebut, pada bulan Mei 1995, pemerintah mengumumkan sepuluh bidang usaha dihapuskan dalam daftar negatif investasi (DNI). Kesepuluh bidang usaha yang dihapuskan dari DNI adalah minyak sawit, *block board*, rotan, ketel uap, kendaraan bermotor, sigaret putih, gas lighter, formula obat dan lain-lain.

Secara ringkas, berbagai peraturan investasi yang banyak memberikan peluang usaha konglomerat dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini:

Tabel 2: Reformasi Investasi Indonesia, 1985-1995

Reformasi	Isi	Tujuan/Dampak Tak Langsung
1985	Penyederhanaan prosedur pengajuan bagi investasi asing	Pengurangan dalam waktu tunggu dan beberapa dokumen
1986	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Distribusi lokal dibuka bagi perusahaan yang berorientasi ekspor</li> <li>♦ Skema kredit ekspor dibuka bagi keikutsertaan usaha patungan</li> <li>♦ Perdagangan kecil dibuka untuk asing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Departemen store, SOGO dibuka</li> <li>♦ Peningkatan kepercayaan dalam ekonomi</li> </ul>
1986	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Pengenaan setahun bebas pajak pada peralatan yang diimpor</li> <li>♦ Persyaratan visa dari 29 negara dihapus</li> <li>♦ Investasi dari Eropa Timur tidak lagi memerlukan persetujuan intelijen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Respon antusias dari investor asing</li> </ul>
September 1986	Devaluasi maksimum (lebih dari 30%)	Persaingan ekspor meningkat
Juli 1987	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Deregulasi investasi dan perijinan kapasitas</li> <li>♦ Bursa efek terbuka bagi investor asing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Iklim investasi meningkat</li> </ul>
September 1988	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Deregulasi lanjutan dalam industri perkapalan</li> <li>♦ Perusahaan patungan diijinkan mendistribusikan produk mereka ke dalam negeri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Persaingan meningkat</li> </ul>
Juli 1989	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Pergantian daftar prioritas dengan daftar negatif investasi (DNI)</li> <li>♦ Upaya meningkatkan efisiensi BUMN</li> <li>♦ Mendorong privatisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Peningkatan iklim investasi lanjutan</li> <li>♦ Beberapa BUMN menunjukkan peningkatan efisiensi</li> <li>♦ Tanda-tanda go-public makin meningkat</li> </ul>
1989	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Investor portfolio asing diijinkan</li> <li>♦ Membeli 49% perusahaan non-bank yang terdaftar dalam bursa efek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Peningkatan kepercayaan asing pada perekonomian</li> </ul>
November 1989	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Langkah-langkah kinerja BUMN</li> <li>♦ Langkah-langkah khusus meningkatkan efisiensi dalam 775 BUMN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 186 dari 210 BUMN terpengaruhi</li> <li>♦ Penjualan meningkat dalam 52 BUMN</li> <li>♦ Merger perusahaan patungan dalam 59 BUMN</li> </ul>
1990	Hingga 30% saham pabrik semen besar ditawarkan kepada publik	Peningkatan harapan terhadap privatisasi lanjutan
1991	DNI dikurangi dari 75 sampai 60 jenis	Meningkatkan kesempatan investasi
1992	DNI dikurangi lagi dari 60 menjadi 51	Meningkatkan kesempatan investasi
Keppres 32/92	Perijinan pada pemanfaatan tanah dapat diberikan langsung kepada investor asing	Menimbulkan kontroversi
PP 20/94	Sektor publik dibuka 100% untuk investasi asing (pelabuhan, listrik, telekomunikasi, pelayaran, air minum, kereta api, tenaga atom dan media massa).	
Mei 1995	Sepuluh bidang usaha dihapuskan dari DNI (minyak sawit, iblock board, rotan, ketel uap, kendaraan bermotor, sigaret putih, gas lighter, formula obat)	

Sumber: (1). Tahun 1983-1989 oleh Iwan Jaya Aziz. Indonesia. Dalam Williamson, 1994. *The Political Economy of Policy*, WDC, Institute for International Economics, 1994, h.364-2)  
 (2). Tahun 1990-1995 oleh Didi J. Rachbini. 1996. *Ekonomi Politik: Paradigma, Teori, dan Perspektif Baru*. GIDES, Jakarta. H.142

### 3. Harga (*Pricing*)

Kebijakan harga juga dapat dijadikan instrumen pendukung bagi tumbuh dan berkembangnya konglomerasi di Indonesia. Upaya ini mula-mula ditempuh oleh pemerintah untuk melindungi produk-produk strategis dalam negeri untuk tetap eksis di pasar dalam negeri.

Namun sayangnya kebijakan ini justru bertentangan dengan kebijakan liberalisasi investasi yang dilakukan sejak munculnya UU No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA). Bahkan pada waktu itu pemerintah telah menyatakan diri untuk membuka diri terhadap investasi asing. Bahkan tidak hanya itu. Sejak tahun 1984, melalui deregulasi perdagangan dan investasi, pemerintah telah mampu menggairahkan iklim investasi di Indonesia, yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional.

Pada tahun 1986, pemerintah memberikan keringan persyaratan bagi PMA dengan maksimal kepemilikan saham sebesar 20 persen pada awal pendirian dan diperkenankan berkembang hingga 51 persen pangsa modal setelah sepuluh tahun beroperasi. Keppres nomor 15/1987 menandai kemunculan Daftar Skala Prioritas Investasi yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai petunjuk bagi investor asing maupun domestik sektor-sektor unggulan yang sedang dikembangkan pemerintah.

Puncaknya adalah kebijakan investasi yang dianggap paling ekspansi adalah PP nomor 20/1994 yang memungkinkan investor asing memiliki saham perusahaan yang ditanamkannya di Indonesia. Berkaitan dengan upaya menarik investor tersebut, pemerintah mengembangkan kawasan Berikat, yakni kawasan pengembangan industri yang mendapat perlakuan khusus bagi para pengusaha yang membangun atau mengalihkan lokasi perusahaannya ke kawasan tersebut (Pradiptyo dan Satriawan, 1996a).

## TINJAUAN

Sayangnya kebijakan untuk menarik investasi yang sangat ekspansif tersebut harus berhadapan dengan kebijakan harga yang justru kontradiktif pada beberapa produk strategis seperti produk industri baja, kertas dan tanaman perkebunan khususnya cengkeh.

Kebijakan penetapan harga hasil produksi industri besi baja ini dilakukan karena industri tersebut dimonopoli oleh BUMN PT Krakatau Steel. Banyak kalangan yang menilai wajar jika pemerintah memonopoli produksi besi baja yang merupakan bahan baku penting dalam kegiatan perekonomian. Penguasaan besi baja oleh pemerintah diikuti dengan penetapan harga agar pihak konsumen tidak dirugikan oleh pihak distributor atau spekulan.

Namun yang tidak wajar adalah kebijakan tata niaga cengkeh, apalagi cengkeh bukan merupakan barang primer yang sangat dibutuhkan masyarakat (seperti beras misalnya). Khusus untuk cengkeh ini, berbarengan dengan munculnya BPPC pemerintah telah melakukan perubahan penetapan harga sebanyak dua kali yakni melalui Surat keputusan Menteri Perdagangan (Mendag) nomor 23/Kp/I/1991 dan Keppres 20/1992.

Keppres 20/1992 ini memperkenalkan konsep SWKP sebagai salah satu bagian dari struktur harga cengkeh. Di sisi lain kebijakan tersebut meningkatkan baku mutu cengkeh penjualan dari petani, meningkatkan tabungan penyertaan modal ke KUD, dan penurunan harga patokan cengkeh. Dengan demikian terjadi penurunan cengkeh secara drastis di tingkat petani (Pradiptyo dan Satriawan, 1996b).

Mengenai kebijakan penetapan harga tersebut dapat dilihat dalam *tabel 3* berikut ini.

Tabel 3: Penetapan Harga Produk oleh Pemerintah

Tahun	Komoditas	Peraturan
1980	Cengkeh	KEP 39/PJ 321/1980
1983	Bahan baku besi baja	135/KP/II/1983
1983	Besi baja impor	146/KP/IV/1983
1983	Kertas koran impor	147/KP/IV/1983
1984	Besi baja cold rolled sheet dan cold roled coil asal impor	475/KP/IV/1984
1984	Kertas koran impor	1432/KP/XII/1984
1986	Kertas koran produksi dalam negeri	170/KP/V/1986
1991	Cengkeh	SK Mendag 23/Kp/I/1991
1992	Cengkeh	Keppres 20/1992

Sumber : Pradiptyo, Rimawan dan Satriawan, Elan. *Mobil Nasional dan Strategi Industrialisasi Kita*. Dalam Jurnal AFKAR Vol.I, No.1, Januari-Maret 1996, H.35.

Sementara itu, kenaikan harga kertas beberapa waktu lalu, memicu berbagai kritik keras dari banyak kalangan, karena justru kenaikannya di tengah-tengah program pemerintah dalam mempromosikan gerakan gemar membaca. Kenaikan ini dipicu oleh kenaikan bahan baku pulp dan kertas impor. Banyak kalangan berpendapat bahwa kenaikan harga kertas ini tidak masuk akal. Karena struktur harga produksi kertas di Indonesia relatif rendah dan bahkan oleh produsen sendiri dikatakan sebagai terendah di dunia. Biaya produksi kertas di Indonesia adalah US\$285 per metrik ton dibandingkan dengan Canada sebesar US\$429 per metrik ton, dan Skandinavia sebesar US\$485 per metrik ton.

Tingkat konsentrasi industri kertas dan pulp tergolong tinggi, dikuasai oleh sejumlah kecil produsen seperti PT Indah Kiat (Sinar Mas Group), PT Inti Indorayon (Raja Garuda Mas), dan PT Tjiwi Kimia (Sinar Mas Group). Beberapa BUMN juga memproduksi kertas seperti antara lain, Kertas Leces Padalarang, memiliki

## TINJAUAN

andil yang sangat kecil. Sementara produksi kertas koran hanya dilakukan oleh dua perusahaan yakni PT Aspax Paper (swasta) dan PT Kertas Leces (BUMN). Peran kertas koran ini sangat penting karena selain dikonsumsi oleh surat kabar dalam jumlah besar, juga dibutuhkan oleh penerbitan buku yang pada umumnya menggunakan kertas koran. *Tabel 4* memperlihatkan jumlah produksi koran yang dikuasai oleh PT Aspax sebesar 70%. Data ini menunjukkan besarnya peran prosuden kertas koran untuk menentukan kapasitas produksi dan harga kertas koran.

**Tabel 4:** Kapasitas Terpasang dan Riil Industri Kertas Koran

Perusahaan	Kapasitas Terpasang (Ton/Tahun)	Kapasitas Riil (Ton/Tahun)
PT Aspax Paper	210.000	200.000
PT Kertas Leces	90.000	60.000
<b>Total</b>	<b>300.000</b>	<b>260.000</b>

Sumber : Departemen Perindustrian, 1995

Kebutuhan kertas koran diperkirakan mencapai 150 ribu ton. Jumlah ini jauh lebih rendah dari kapasitas riil pabrik kertas koran. Menurut keterangan pemerintah stok kertas sebenarnya masih berada di atas kebutuhan. Namun kenyataannya, pemakai kertas sering menghadapi kelangkaan kertas di pasar yang mengakibatkan harga kertas membumbung tinggi.

Konsentrasi penentuan harga bukan hanya dalam produk kertas saja. Produk semen misalnya, di Indonesia dikuasai oleh sedikit produsen yang dibatasi kawasan pemasarannya. Produsen tersebut terbagi dalam pembagian wilayah pemasaran, atau lebih akrab dikenal dengan sebutan regionalisasi pasar, yang ditentukan oleh Asosiasi Semen Indonesia (ASI). Sistem regionalisasi ini mencerminkan praktik oligopoli karena beberapa perusahaan mengua-

## TINJAUAN

sai pasar tertentu. *Tabel 5* memperlihatkan regionalisasi pasar semen yang dikuasai oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa.

**Tabel 5 : Regionalisasi Pasar Semen**

Regionalisasi Pasar	Perusahaan Semen				
	Padang	Andalas	Baturaja	Indocement	Cibinong
Sumatra	Padang	Andalas	Baturaja	Indocement	Cibinong
DKI & Jabar	Indocement	Cibinong	Nusantara	Padang	-
Jateng & DIY	Indocement	Nusantara	Gresik	Padang	Cibinong
Jatim	Indocement	Nusantara	Gresik	Cibinong	Padang
Bali	Padang	Gresik	-	Tonasa	Indocement
Kalimantan	Tonasa	Tonasa	-	Padang	-
Sulawesi	Tonasa	Indocement	-	-	-
NTT, Iria, Maluku, Timor	Tonasa	Indocement	-	Kupang	-

Sumber : Asosiasi Semen Indonesia, 1995

Kemampuan Indocement untuk menguasai pasar semen di Indonesia ditunjang oleh kemampuan produksinya yang merupakan produsen terbesar semen yakni 39% dari total produksi semen nasional.

Kapasitas produksi ini masih sangat rendah daripada kebutuhan semen nasional. Kebutuhan semen diperkirakan sebesar 25 ribu ton pada tahun 1995/1996. Pada akhir Repelita VI diperkirakan produksi semen mencapai sekitar 26 ribu ton tetapi kebutuhan meningkat menjadi 40 ribu ton. Kesenjangan antara permintaan dan pasokan ini mendorong produsen semen swasta untuk memanfaatkan keadaan ini untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menaikkan harga. Harga pedoman setempat (HPS) untuk Jawa yang semula adalah RP 5.930 per zak, secara sepihak dinaikkan oleh produsen menjadi Rp. 7100 per zak yang mengakibatkan harga semen di pasar membumbung tinggi bahwa di beberapa tempat pernah mencapai Rp. 12.000,-. Setelah krisis melanda Indonesia sejak medio Juni lalu, kini harga semen mencapai

## TINJAUAN

Rp.17.000,- per zak. Tentu makin besar keuntungan konglomerat dari penentuan harga oligopoli ini.

Beberapa perkiraan, dengan HPS lama, pengusaha telah memperoleh keuntungan cukup besar. Biaya rata-rata produksi semen di Indonesia tahun 1994 hanyalah Rp. 4.785,- per zak dengan berat 40 kg (*Tabel 6*). Dari tingkat harga itu, harga rata-rata untuk semen swasta dihitung Rp. 4.800,32 per zak. Sedangkan semen BUMN Rp. 4.711, 12 per zak.

**Tabel 6: Biaya Produksi Semen, 1994**

Komponen Biaya	Per Ton (Rupiah)	Per Zak (40 kg) (Rupiah)
Bahan baku	25.577	1.022,28
Bahan bakar	9.642	385,
Listrik	23.038	921,52
Gaji pegawai	11.464	458,56
Pemeliharaan	9.843	393,73
Penyusutan	12.601	504,04
Operasional	12.547	501,88
Bunga	14.920	596,80
<b>Total rata-rata</b>	<b>119.932</b>	<b>4.785,28</b>
<b>Total swasta</b>	<b>120.088</b>	<b>4.803,52</b>
<b>Total BUMN</b>	<b>117.778</b>	<b>4.711,12</b>

Sumber: Kompas, 5 Mei 1995

Keadaan pasar semen, karena struktur oligopolis, tersebut sangat merugikan konsumen. Kenaikan harganya pun seringkali tidak rasional. Sebagai contoh pada tahun 1995 yang lalu, karena keadaan pasar yang tidak menentu, pemerintah mengumumkan kenaikan HPS yang pada waktu itu sebesar Rp. 8.290 per zak. Harga ini jika di kurs kan dengan dollar AS (yang pada waktu itu US\$1 sama dengan Rp.2.300,-) merupakan harga tertinggi di Asia. Harga semen Indonesia adalah US\$ 94/ton, lebih tinggi dari

## TINJAUAN

Malaysia dan Korea yang masing-masing sebesar US\$66/ton dan US\$70/ton, sebagaimana terlihat pada tabel 7.

Tabel 7: Harga Semen Di Asia, 1994 (US\$/ton)

Negara	Harga
Jepang	148
Taiwan	97
Indonesia	94
Singapura	94
Malaysia	66
Filipina	77
Korea Selatan	70

Sumber: Pusat Informasi Kompas

Demikian juga produk tepung terigu, sebagai bahan baku mie tergolong produk monopoli. Berdasarkan hasil penelitian Indef pada tahun 1995 dikatakan bahwa mulai dari pengadaan impor bulir gandum termasuk pengapalan, pengolahan, pemasaran dan pemakaiannya dilakukan oleh satu kelompok yang terdiri dari beberapa perusahaan di bawah kelompok Salim, seperti misalnya PT Bogasari, PT Indofood Sukses Makmur dan PT Ubindo.

Dalam penelitian itu dijelaskan bahwa sebagian besar (85%) industri tepung terigu dikuasai oleh PT Bogasari dan sisanya dikuasai PT Berdikari. Bahkan pengolahan bulir-bulir gandum sebesar 15% yang semula dilakukan oleh PT Berdikari, kini telah ditangani PT Bogasari. Sementara untuk pasar mie, kelompok Salim di bawah PT Indofood Sukses Makmur menguasai pasar Mie di Indonesia sebesar 85%.

Selain memonopoli tepung terigu, masih menurut Indef, juga disinyalir adanya subsidi terselubung dalam kegiatan tepung terigu

## TINJAUAN

itu. Menurut data BPS yang menggunakan data Bulog, pada tahun 1994, harga impor bulir gandum tertulis senilai Rp. 418 per kilogram. Namun ketika diserahkan kepada PT Bogasari dan Berdikari untuk diolah menjadi gandum, hanya seharga Rp. 141 per kilogram. Dengan demikian terdapat selisih harga sebesar Rp. 277 per kilogram. Dengan jumlah impor Rp. 2,7 juta ton pada tahun itu, maka subsidi terselubung itu sekitar Rp. 760 milyar. Itu baru pada tahun 1994 saja, belum termasuk tahun-tahun sebelumnya, yang diperkirakan Rp. 451,8 milyar pada tahun 1992 dan Rp. 582,8 milyar pada tahun 1993 (lihat tabel 8).

Tabel 8: Harga Impor, Penyerahan Gandum, dan Subsidi

Tahun	Harga Impor Rp/Kg	Harga Penyerahan Bulog ke Bogasari (Rp/Kg)	Selisih Rp/Kg	Impor (Juta Ton)	Total Subsidi (Milyar)
1992	334	141	193	2,341	451,8
1993	365	141	224	2,602	582,8
1994	418	141	277	2,740	760,0

Sumber: Indef, 1995

#### 4. Perlakuan Khusus (*Special Privileges*)

Berkembangnya konglomerat juga didorong oleh adanya kebijakan perlakuan khusus oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah pembangunan industri mobil nasional (TIMOR) melalui Inpres No. 2 tanggal 19 Pebruari 1996. Inpres tersebut mengatur beberapa hal penting. *Pertama*, bahwa pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah untuk secepatnya mewujudkan pembangunan industri mobil nasional yang memenuhi unsur: menggunakan merek yang diciptakan sendiri, diproduksi di dalam negeri, dan menggunakan komponen buatan dalam negeri.

## TINJAUAN

Untuk mendukung langkah-langkah tersebut, pemerintah menunjuk tiga menteri untuk mengkoordinasikannya, antara lain Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM. Menperindag berperan untuk membina, membimbing, dan memberi kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar industri mobil nasional tersebut menggunakan merek yang diciptakan sendiri, sebanyak mungkin menggunakan komponen buatan dalam negeri, dan dapat mengekspor mobil hasil produksinya.

Sedangkan Menteri Keuangan memberikan kemudahan di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk: *pertama*, pembebasan bea masuk atas impor komponen yang masih di produksi, *kedua*, pemberlakuan tarif PPN 10 persen atas penyerahan mobil yang diproduksi, dan *ketiga*, pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan mobil yang diproduksi, ditanggung oleh pemerintah. Sementara itu Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM mengambil langkah pengamanan sehingga pembangunan industri mobil nasional dapat berjalan lancar.

Inpres tersebut didukung dengan PP 20/tanggal 19 Pebruari 1996 tentang perubahan atas peraturan pemerintah RI No. 50 tahun 1993 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 tahun 1994. PP tersebut menegaskan tentang pengenaan pajak penjualan atas barang mewah atas penyerahannya ditanggung oleh pemerintah.

Semula munculnya Inpres no. 2/1996 ini dinilai oleh sebagian kalangan menandai fase baru kebijaksanaan industri nasional dan sekaligus memperjelas arah perkembangan industri nasional. Hal ini memang cukup masuk akal karena selama lebih dari 25 tahun kebijakan industri (otomotif khususnya) ditandai oleh ketergantungan yang sangat tinggi oleh prinsipal asing, 93% diantaranya

dikuasai Jepang, selebihnya 7% dikuasai oleh prinsipal dari Eropa dan Amerika Serikat.

Sekalipun, kemampuan industri otomotif nasional untuk mencapai tingkat kandungan lokal sebesar 60% dalam waktu tiga tahun tidaklah mudah dicapai, namun munculnya Inpres ini justru akan semakin mendorong berkembangnya industri komponen di dalam negeri (Juoro, 1996). Apalagi pasar otomotif masih sangat terbuka.

Selain pandangan yang optimis tersebut, banyak kalangan yang secara pesimis menilai akan gagalnya proyek "politik" mobil Timor ini. Salah satu kritik keras dilontarkan oleh Faisal H. Basri (1996), yang yakin bahwa mobil nasional adalah impian yang tidak bakal terjadi. Dia mencatat ada beberapa hal yang sangat kontroversial, *pertama*, istilah mobil nasional adalah merupakan rekayasa untuk membangkitkan kebanggaan bahwa bangsa Indonesia yang besar ini telah memiliki dan mampu menghasilkan mobil sendiri.

*Kedua*, soal rekayasa pemilikan saham. Sejak awal tampaknya Faisal Basri telah mencium bau "anyir" proyek politik ini. Betapa mudahnya mengalihkan status perusahaan nasional dengan 100 persen saham warga negara Indonesia menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing murni (PMA 100 persen). Siapapun bisa mendirikan perusahaan dengan 100 persen saham atas nama sendiri walaupun tak menyetorkan dana sama sekali.

*Ketiga*, rekayasa kandungan lokal. Sudah bisa dipastikan sejak kelahiran Inpres ini bahwa target kandungan lokal sebesar 20 persen pada akhir tahun pertama serta masing-masing 40 persen dan 60 persen pada tahun kedua dan ketiga tidak akan tercapai. Menurut Faisal, jangankan mulai merakit, pembebasan tanah untuk lokasi pabriknya saja hingga sekarang belum selesai.

Demikian juga dengan pengamat yang lain seperti Soeseno, FX. Sekjen Gaikindo, dengan memberikan kemungkinan dampak

negatif yang akan ditimbulkan oleh kebijakan Inpres ini. *Pertama*, dampak pasar kendaraan bermotor. Secara psikologis, munculnya Inpres 2/1996 akan menimbulkan pergeseran segmen pasar dan perubahan terhadap permintaan pasar. Adapun dampak yang secara nyata akan muncul adalah (1) adanya penundaan niat untuk membeli mobil merek lain dengan alasan bahwa mobil merek Timor harganya sangat murah. (2) pembatalan pesanan (*indent*) terhadap mobil merek lain. (3) kredit mobil yang sedang berjalan tidak lagi diteruskan. (4) Timbulnya pergeseran permintaan dari kendaraan jenis minibus beralih ke jenis sedan.

*Kedua*, bagi investor atau calon investor akan mempertimbangkan dengan lebih hati-hati dengan investasinya. Mereka juga akan menanggukkan sementara investasinya. Selain itu, investor dan calon investor kemungkinan akan menarik kembali investasinya dari Indonesia dan mengalihkannya ke negara lain.

*Ketiga*, defisit pendapatan negara. Akibat bebasnya bea masuk (BM) dan pajak penjualan barang mewah (PPn-BM) kendaraan Timor yang ditanggung oleh negara, maka akan menimbulkan defisit pendapatan negara selama tiga tahun, dapat mencapai limit terendah sebesar 2,1 triliun dan limit tertinggi diperkirakan akan mencapai 44,9 triliun.

*Keempat*, akibat lainnya adalah kemungkinan penggunaan devisa negara akan meningkat. Dan *kelima*, adalah kemungkinan pasar otomotif akan anjlok 70%.

Sementara itu, menurut PT Sucofindo, BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengaudit kinerja Timor, menyimpulkan dua kesalahan yang dibuat oleh Timor. *Pertama*, PT Timor Putra Nasional, yang memproduksi mobil Timor, mengalami keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban kandungan lokal (*local content*) di mana pada tahun pertama baru sebesar 8,3 persen (*Tekad*, 21-27 Desember 1998). Padahal seharusnya, kandungan

lokal Timor telah mencapai 20 persen pada tahun pertama dan 40 persen pada tahun kedua.

Kesalahan kedua adalah PT TPN telah mengingkari kewajiban imbal beli (*counter trade*) kepada KIA Motor, yang memproduksi mobil tersebut di Korea Selatan. PT TPN yang mengimpor mobil dalam bentuk *completely build up* (CBU) dan *completely knocked down* (CKD) ini semestinya mengekspor ke Korea Selatan minimal 25 persen dari nilai impor yang dilakukannya, yang selama ini telah mencapai 888 juta dolar AS.

Menurut PT Sucofindo, mobil yang telah diimpor telah mencapai 40 ribu unit atau 90 persen telah terpenuhi dari target yang direncanakan sebesar 45 ribu unit. Dari jumlah yang diimpor tersebut, sebanyak 39.727 unit didatangkan ke Jakarta dalam bentuk CBU, sementara 1.240 unit lainnya dalam bentuk CKD. Dari sejumlah itu, kewajiban membayar pajak PT TPN kepada pemerintah sebesar Rp. 3,093 triliun.

Tabel 9: Nilai Kewajiban Pajak Timor

(Dalam juta Rupiah)

Jenis Pajak	Jumlah Belum Dibayar	Jumlah Sudah Dibayar
Bea Masuk	1.878.356,8	--
PPn Impor	187.835,7	95.558,5
PPn-Bm Impor	980.680,7	--
PPh Psl.22 Impor	46.928,9	24.139,6
Total	3.093.802,1	119.698,1

Sumber : Departemen Keuangan, Desember 1998

Tabel 9 menunjukkan rincian kewajiban pajak Timor, yang terdiri dari biaya masuk Rp. 1,878 triliun dan PPn-BM sebesar 980,680 miliar rupiah. Kedua jenis pajak tersebut harus dibayar kepada pemerintah karena proyek tersebut adalah proyek KKN. Meskipun menurut ketentuan Inpres No.2/1996 dan PP 20/1996

yang membayar adalah pemerintah. Namun karena proses mendapatkannya adalah jelas-jelas lewat proses KKN maka PT TPN harus mengembalikannya kepada pemerintah.

Perlakuan khusus ini juga banyak terjadi pada sektor-sektor ekonomi lainnya seperti perhubungan atau proyek jalan tol.

### Koneksi Politik (*Political Connection*)

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa keberhasilan konglomerat di Indonesia sebagian besar didorong oleh koneksi politik para pemimpin Orde Baru pada saat itu. Istilah koneksi politik ini mulai populer sejak awal Orde Baru. Namun mulai berkembang luas pada tahun 70-an dan puncaknya adalah menjelang tahun 1980-an.

Munculnya koneksi politik ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan pemerintah Orde Baru dalam mendapatkan sumber dana untuk membiayai pembangunannya. Dengan dana yang sangat terbatas itu, pemerintah harus mencari dana tambahan untuk menutupi kekurangan anggaran pembangunan tersebut. Dana tambahan itulah yang disebut dengan istilah "dana inkonvensional", yang diperoleh dari pemilik dana dan para penasehat usaha Cina.

Untuk bisa memperoleh dana inkonvensional tersebut, pemerintah harus memberikan imbalan kepada mereka berupa perlindungan terhadap keberadaan pemilik dana dan penasehat usaha Cina dari segala macam gangguan penjarahan dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Selain itu, ternyata pengusaha Cina ini cukup cerdas yang bukan hanya perlindungan secara fisik, tetapi juga perlindungan yang menyangkut kemudahan untuk memperoleh barang-barang yang tidak banyak tersedia di pasar, kredit bank, lisensi, dan kontrak-kontrak pemerintah.

Akibatnya dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama hubungan antara perwira-perwira tentara tertentu dan pengusaha Cina berkembang luas. Namun setelah *oil-boom*, koneksi politik

## TINJAUAN

pun mulai berkurang. Hal demikian dimungkinkan karena Pemerintah telah mampu mencukupi kebutuhan anggaran pembangunannya dari rejeki minyak bumi tersebut.

Dari nama-nama konglomerat yang lahir dari koneksi politik ini adalah antara lain : Liem Sioe Liong dan Bob Hasan, Hendra Raharja pemilik bank Harapan Sentosa, Cokrosaputra dari "Batik Keris", Goh Swie Kie sebagai "cukong Bulog, Ir. Ciputra dan lain sebagainya.

Tabel 10 berikut ini memaparkan beberapa konglomerat yang dibesarkan karena koneksi politik pada tahun 70-an hingga 80-an sebagai berikut :

**Tabel 10 : Kelompok Pengusaha Besar Utama Cina di Indonesia**

Keluarga/ Kelompok	Kegiatan Utama	Mulai Berdiri	Lain-lain
Liem Sioe Liong - SEDC (Salim Electronic Development Co.)	Perdagangan, semen, baja mobil, pengem- bangan properti	1950an 1968: bisnis mobil	Pemilikan bersama dengan keluarga Cendana di berbagai perusahaan. Kaitan dengan modal asing terdiversifikasi. Divisi luar negeri yang besar di First Pacific Holdings. Kelompok yang sangat terdiversifikasi.
Willem Soeradjaja - ASTRA	Impor dan industri olahan, pengembangan perumahan, agribisnis	1950an	Kelompok yang relatif terkonsentrasi, tetapi sedang mengadakan diversifikasi. Usaha patungan dengan Toyota Corp. Koneksi politik pada awalnya penting, belakangan kurang. Struktur perusahaan kuat.
Indra Wijaya - Sinar Mas	Industri olahan dan distribusi minyak goreng	1960an	Terkonsentrasi. Rekan usaha Liem Sioe Liong pada tahun 1980an.
Gondokusuma - Dharmala	Perdagangan barang, industri olahan, keuangan, pengembangan perumahan.	1960an	Awalnya terkonsentrasi, belakangan mengadakan diversifikasi non-politik.
Soh Swie Kie - Günning Sewu	Beras, gula, distribusi barang	1950-1960an??	Terdiversifikasi. Koneksi dekat dengan Bulog.
Yap Swie Kie - Berka	Perdagangan, industri olahan, kayu	Sebelum 1960an	Terkonsentrasi. Koneksi Politik
Mochtar Riady - Lippo	Perbankan (LippoBank dan BCA), keuangan, dll.	1960an	Terkonsentrasi. BCA bagian kerajaan perusahaan Liem.
Gunawan Gunadi - Pann Bank	Perbankan, keuangan, dll.	Sebelum 1960an	Terkonsentrasi. Sungan utama BCA
Ciputra - Pembangunan Jawa	Konstruksi, pengembangan perumahan	1960an	Terdiversifikasi. Kuat dalam tanah, bangunan dan konstruksi; dekat dengan pemerintah DKI Jakarta dan belakangan dengan keluarga Cendana

## TINJAUAN

Bob Hasan	Pelavaran, kayu, pengembangan properti, dll.	1970an	Terdiversifikasi. Sangat politis dan dekat dengan keluarga Cendana.
Ong Seng Heug - Bank Kamayan/Goepa	Perdagangan, perbankan	1960an	Dekat dengan jenderal Survo, paling buruk diantara cukong-cukong awal, meninggal tahun 1976.
Hendra Raharjo - Harpoon	Sepeda Motor (Yamaha), pengembangan perumahan, keuangan.	1970an	Terdiversifikasi. Rumah tahun 1983-1984, diselamatkan Liem Sioe Liong.
Agus Nursalim - Kedung	Industri olahan (gelas, minyak goreng)	1950an	Terkonsentrasi, adik Soeharto, Pröbostejo, salah satu pemegang saham.
The Nien Kung - Darmatex	Tekstil	1970an	Relatif terkonsentrasi. "Raja Tekstil" 1980-an. Koneksi politik kuat.
Tan Siong Kie - Roda Mas	Impor dan pabrik barang-barang kaca dan listrik	1950an	Relatif terkonsentrasi. Koneksi Politik terbatas.
Ongko Kaharuddin - Arva Lipava	Tanah dan bangunan, perbankan, industri olahan		Terdiversifikasi. Koneksi Medan kuat.
Adil Nurumba - Gesturi Lloyd	Rehayan		Terkonsentrasi. Kelompok pelavaran terbesar pada tahun 1970an; dalam kesulitan pada pertengahan tahun 1980. Tak lagi tampak sangat politis.

Sumber: Ruth Mc Vey, 1988. *Kaum Kapitalis Asia Tenggara*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. H. 326-328.

### Penutup

Dari uraian panjang di atas, dapatlah disimpulkan bahwa konglomerat di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat rapuh. Hal ini terlihat dari keberadaannya ternyata tidak lepas kaitan dengan koneksi politik antara mereka dengan penguasa pada waktu itu. Kita bisa melihat bagaimana pengusaha atau konglomerat terkaya Indonesia sekarang, Liem Sioe Liong, yang memulai usahanya pada tahun 1950-an di bidang perdagangan, semen, baja, mobil, pengembangan properti dengan memanfaatkan hubungan dekatnya dengan keluarga Cendana. Demikian juga dengan William Soerjadaja pemilik Astra, yang memiliki kegiatan utamanya adalah importir dan industri pengolahan, pengembangan perumahan dan agribisnis juga dibesarkan koneksi politik, meskipun pada akhirnya menjauhi dunia itu (koneksi politik). Dan masih

## TINJAUAN

banyak lagi, seperti Bob Hasan, Hendra Raharja pemilik Bank Harapan Sentosa, Cokrosaputra dari "Batik Keris", Goh Swie Kie sebagai "cukong Bulog, Ir. Ciputra dan lain sebagainya juga menggunakan legitimasi politik pengusaha untuk memulai usahanya.

Namun demikian banyak di antara mereka dalam proses pengembangan usahanya tetap memegang teguh profesionalisme konglomerat. Tetapi yang seperti ini tidak banyak. Terbukti banyak konglomerat yang *collapse* dan sangat rapuh ketika mereka dihadapkan pada krisis ekonomi dan moneter sekarang ini.

Besarnya konglomerat Indonesia juga sangat didorong oleh kemampuan mereka memanfaatkan setiap kebijakan deregulasi yang dimulai sejak awal dekade 1980-an, terutama di bidang perdagangan, investasi, kebijakan perpajakan, penetapan harga dan perlakuan khusus.

Sampailah pada kesimpulan bahwa konglomerat Indonesia sangat rapuh karena kebergantungannya pada politik kekuasaan di mana mereka berafiliasi. Jika politik menghendaki lain, maka boleh jadi berakhirilah era konglomerasi ini.

**BIBLIOGRAFI**

- Gie, Kwik Kian. 1994. *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. H. 234-235.
- Gie, Kwik Kian. 1998. *Saya Bermimpi Jadi Konglomerat*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rachbini, Didik J. 1996a. *Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*. LP3ES. Jakarta.H. 118.
- \_\_\_\_\_. 1996b. *Khazanah Pemikiran Ekonomi Indonesia*. LP3ES. Jakarta.H. 122.
- Pangestu, Marie. 1994. Pengantar. Dalam Wie, Thee Kian. 1994. *Industrialisasi di Indonesia: Beberapa Kajian*. LP3ES. Jakarta. H. xxi.
- Onghokham. Pengantar: Kapital dan Politik. Dalam Ruth Mc Vey. 1998. *Kaum Kapitalis Asia Tenggara (Southeast Asian Capitalists)*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. H.xiii.
- Mc Vey, Ruth. 1998a. *Kaum Kapitalis Asia Tenggara (Southeast Asian Capitalists)*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. H.27-28.
- \_\_\_\_\_. 1998b. *Kaum Kapitalis Asia Tenggara (Southeast Asian Capitalists)*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. H.7.
- \_\_\_\_\_. 1998c. *Kaum Kapitalis Asia Tenggara (Southeast Asian Capitalists)*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. H.7.
- \_\_\_\_\_. 1998d. *Kaum Kapitalis Asia Tenggara (Southeast Asian Capitalists)*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. H.308-309.
- \_\_\_\_\_. 1998e. *Kaum Kapitalis Asia Tenggara (Southeast Asian Capitalists)*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. H.310.
- \_\_\_\_\_. 1998f. *Kaum Kapitalis Asia Tenggara (Southeast Asian Capitalists)*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. H.311.
- Supriatma, A. Made Tony. 1996. *Bisnis dan Politik: Kapitalisme dan Golongan Tionghoa di Indonesia*. Dalam *Penguasa Ekonomi dan Siasat Pengusaha Tionghoa*. Lembaga Studi Realino. Yogyakarta. H. 71-72.

## TINJAUAN

Haz, Hamzah. 1997. *Beberapa Masalah di Sekitar Konglomerasi*. Dalam Kumala Hadi, dkk. *Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta. H. 195.

Hasibuan, Nurimansyah. 1997a. *Oligopoli, Monopoli dan Konglomerasi*. Dalam Kumala Hadi, dkk. *Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta. H. 189.

\_\_\_\_\_. 1997b. *Oligopoli, Monopoli dan Konglomerasi*. Dalam Kumala Hadi, dkk. *Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta. H. 189.

Pradipto, Rimawan dan Satriawan, Elan. *Mobil Nasional dan Strategi Industrialisasi Kita*. Dalam Jurnal AFKAR Vol.I, No.1, Januari-Maret 1996. H.35.

\_\_\_\_\_. *Mobil Nasional dan Strategi Industrialisasi Kita*. Dalam Jurnal AFKAR Vol.I, No.1, Januari-Maret 1996. H.36.

Juoro, Umar. *Inpres No. 2/1996: Memperjelas Arab Industrialisasi Nasional*. Dalam Jurnal AFKAR Vol. I, No.1, Januari-Maret 1996. H.85-87.

Basri, Faisal H. *Mobil Nasional Impian yang Tak Bakal Jadi Kenyataan (Tanpa Menciptakan Biaya Ekonomi Yang Teramat Mahal)*. Dalam Jurnal AFKAR Vol.I, No.1, Januari-Maret 1996. H.114-115.

Soeseno, FX. *Prospek Industri Otomotif Sangat Ditentukan Oleh Partisipasi Semua Pihak*. Dalam Jurnal AFKAR Vol.I, No.1, Januari-Maret 1996. H.108-111.

Suwarno, Guntoro dan Subagja, Guntur. *Menagih Timor Dibayar Gugatan*. Tekad. No.8/Tahun I. 21-27 Desember 1998. H.4. ■